

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 *Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007*. (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. (2013). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 *Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. (2015). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal*. (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akutansi Pemerintah*. (2010). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Pembendaharaan Negara*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 *Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. (2014). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Achmad, T. (2010). 'Dewan Komisaris Dan Transparansi: Teori Keagenan Atau Teori Stewardship?'. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm. 1–12

Anton, F. X. (2010). 'Menuju Teori Stewardship Manajemen'. *Majalah Ilmiah Informatika*, Vol. 1, No. 2.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*. (2019). <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2019.

Bawono, I.R. & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada skpd dan skpkd (pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi)*. Salemba Empat.

Boyle, E.J., Cooper, S.M. & Geiger, M.A. (2004). 'An emprical analysis of internal control weaknesses under sas no. 78: an examination of state audit reports'. *Accounting Faculty Publications*. Page. 1-16.

Erlina. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013*. Salemba Empat.

Fauza, N. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah'. *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, halaman 1-15.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). *Akutansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

- Hartono, R., Mahmud & Utaminingsih, N. S. (2014). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern'. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*, Lombok, halaman 1-13.
- Kawedar, W. (2009). 'Opini audit dan sistem pengendalian internal'. *Journal of Accounting and Auditing*, vol. 6, No. 1, halaman 1-15.
- Kristanto, S. B. (2009). 'Pengaruh ukuran pemerintahan, pendapatan asli daerah (pad), dan belanja modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal'. *Jurnal UKRIDA*, Vol. 9, No. 1, halaman 41-62.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martani, D. & Zaelani, F. (2011). 'Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia'. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, halaman 1-27.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nurwati, I. & Trisnawati, R. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah (studi kasus pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah periode 2011-2012)'. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, halaman 363-373.
- Petrovits, C., Shakespeare, C. & Shih, A. (2009). 'The causes and consequences on internal control problems in nonprofit organizations'. *American Accounting Association*, Vol. 86, No. 1, Page. 1-38.
- Putri, N. K. & Mahmud, A. (2015). 'Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pad, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian internal'. *Accounting Analysis Journal*, halaman 1-8.
- Rachmawati, D. E. & Handayani, N. (2016). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota'. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No.4, halaman 1-17.
- Raharjo, E. (2007). 'Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi'. *Fokus Ekonomi*, vol. 2, no. 1.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, I. P. (2016). 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah'. *Jom FEKON*, Vol. 3, No. 1, halaman 679-692.

- Saputro, E. A. & Mahmud, A. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah'. *Accounting Analysis Journal*, halaman 1-9.
- Sekaran, U. (2006), *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Suwanda, D. & Dalibas. (2013). *Sistem pengendalian internal pemerintah daerah*, PPM.
- Tunggal, A. W. (2014). *Mendeteksi kecurangan dalam akuntansi*. Harvarindo.
- Yamin, R. & Sutaryo. (2015). 'Faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia'. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, halaman 1-2
- Yeni, E., Fauziati, P & Nurhuda. (2015). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah (studi empiris kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat 2010-2012).

